

---

## Kenaikan Berkala Tarif PPN Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia

**Nurul Aliyul Azhim<sup>1</sup>, Nazwa Putri Syahbana<sup>2</sup>, Putri Noor Hidayah<sup>3</sup>, Fadhila Putri Nadya Sudarsono<sup>4</sup>, Vebri<sup>5</sup>, Praja Hadi Saputra<sup>6</sup>**

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [2311102436025@umkt.ac.id](mailto:2311102436025@umkt.ac.id), [2311102436065@umkt.ac.id](mailto:2311102436065@umkt.ac.id),  
[2311102436085@umkt.ac.id](mailto:2311102436085@umkt.ac.id), [2311102436054@umkt.ac.id](mailto:2311102436054@umkt.ac.id), [2311102436046@umkt.ac.id](mailto:2311102436046@umkt.ac.id),  
[praja.hs@umkt.ac.id](mailto:praja.hs@umkt.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The government's policy of gradually increasing Value Added Tax (VAT) rates is an important strategy to strengthen state revenue while maintaining fiscal stability. Based on the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), the VAT rate in Indonesia has increased from 10% to 11% and is planned to increase again to 12% in the following period. This periodic increase phenomenon has given rise to various views regarding its impact on the national economy. This analysis aims to examine theoretically and empirically the implications of the VAT rate increase on the Indonesian economy through a literature review approach. The study was conducted by examining various sources, such as national and international journals, policy articles, and previous research results that discuss the relationship between VAT increases, inflation, and economic growth. Based on taxation theories such as the Laffer Curve and the tax incidence theory, VAT rate increases can increase state revenue, but also have the potential to reduce purchasing power, trigger inflation, and suppress consumption and investment activities. Therefore, this analysis is expected to provide a more comprehensive picture of how the gradual VAT increase policy can affect the national economy and become a consideration for the government in formulating fair and sustainable tax policies.*

**Keywords:** Value Added Tax, VAT Rate Increase, Indonesian Economy, Inflation, GDP

### ABSTRAK

*Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN di Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 11% dan direncanakan naik kembali menjadi 12% pada periode berikutnya. Fenomena kenaikan berkala ini menimbulkan beragam pandangan mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk meninjau secara teoritis dan empiris implikasi kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara kenaikan PPN, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori perpajakan*

seperti Laffer Curve dan teori insiden pajak, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, memicu inflasi, serta menekan aktivitas konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan kenaikan PPN yang bertahap dapat mempengaruhi perekonomian nasional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif PPN, Perekonomian Indonesia, Inflasi, PDB

## PENDAHULUAN

Secara konseptual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai instrumen pajak tidak langsung yang bertujuan memperkuat pendapatan negara melalui basis pemajakan yang luas. Di Indonesia, kebijakan peningkatan tarif PPN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk membiayai pengeluaran negara. Kajian mengenai dampak PPN menjadi krusial karena pajak ini secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa, sehingga berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan peningkatan tarif PPN pada masa pasca pandemi bertujuan memperkokoh kondisi keuangan pemerintah yang tertekan oleh defisit anggaran yang meningkat. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun atau sekitar 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan realisasi akhir pendapatan dan belanja negara pada periode tersebut, yang menunjukkan perlunya penguatan penerimaan negara. Dalam hal ini, PPN dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan karena basis konsumsi masyarakat yang terus berkembang, terutama di kalangan kelompok menengah sebagai motor utama perekonomian. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Agustina & Hartono, 2022) serta didukung oleh (Lamsah, 2025) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan memperluas kapasitas pembiayaan pemerintah.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat. (Hajatina & Hasanah, 2024) menunjukkan bahwa bahwa peningkatan tarif cenderung menekan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena PPN bersifat regresif, dimana proporsi pengeluaran untuk konsumsi relatif lebih besar pada kelompok tersebut. Dampak lanjutan dari penurunan konsumsi ini adalah potensi melemahnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Brusco & Velayudhan, 2025) mengenai insidensi PPN dalam sistem pajak modern. Kajian tentang VAT Incidence dalam sistem PPN menunjukkan bahwa beban pajak pada akhirnya lebih banyak ditanggung oleh konsumen daripada produsen, terutama ketika elasticitas permintaan lebih rendah dibandingkan elasticitas penawaran. Dalam konteks ini,

peningkatan tarif PPN lebih cepat tercermin dalam kenaikan harga akhir, sehingga memperkuat tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN tidak selalu berdampak negatif. Beberapa riset menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan tarif masih mampu mendorong kenaikan penerimaan negara dan memperbaiki kapasitas fiskal pemerintah. Hal ini mendukung keyakinan bahwa PPN tetap menjadi alat pajak yang efektif apabila berada pada tingkat tarif yang optimal dan diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai.

Variasi hasil antar penelitian sebagian besar disebabkan oleh perbedaan metode analisis, periode pengamatan, serta karakteristik struktur ekonomi yang dikaji. Penelitian dengan pendekatan mikro cenderung menekankan dampak pada perilaku konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga, sedangkan studi makro lebih fokus pada implikasi terhadap penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Perbedaan perspektif ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak peningkatan tarif PPN.

Dari berbagai literatur tersebut, dapat diidentifikasi celah penelitian, khususnya terkait analisis jangka panjang mengenai perubahan struktur konsumsi masyarakat pasca peningkatan tarif PPN serta efektivitas kebijakan mitigasi yang diterapkan pemerintah. Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik menghubungkan insidensi PPN dengan kesejahteraan kelompok rentan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih relatif terbatas.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa tujuan utama telaah literatur bukan hanya untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan tarif PPN dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memahami implikasi kebijakan tersebut terhadap perilaku ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sintesis ini menyediakan landasan konseptual bagi formulasi kebijakan perpajakan yang lebih seimbang antara tujuan fiskal dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

## TELAAH LITERATUR

Berdasarkan Teori Laffer Curve, terdapat hubungan tidak linear antara tingkat pajak dan pendapatan negara. Jika tarif pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan, pendapatan negara bisa meningkat sampai mencapai titik tertentu yang optimal. Namun, jika tarif pajak terlalu naik, hal itu justru bisa mengurangi jumlah orang yang membayar pajak karena menurunnya konsumsi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan kenaikan berkala tarif PPN di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk menentukan batas optimal kenaikan tarif agar penerimaan negara tetap meningkat tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan teori tersebut, sejumlah studi empiris berupaya menganalisis cara kebijakan PPN berfungsi dalam kenyataannya (Agustina & Hartono, 2022), dengan menggunakan pendekatan *Computable General Equilibrium* (CGE), mengungkap bahwa peningkatan tarif PPN dapat menambah penerimaan negara, namun disisi lain berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak ini paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga

berpenghasilan rendah, baik di area perkotaan maupun pedesaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penguatan tarif PPN dapat memicu dampak kontraktif terhadap ekonomi jika tidak ditangani dengan hati - hati.

Begini juga dengan hasil temuan oleh (Lamsah, 2025) menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi, penerimaan negara mengalami peningkatan, namun di sisi lain terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi mendekati batas optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori *Laffer Curve*, terutama apabila tidak disertai kebijakan pendukung yang memadai.

Namun demikian, hasil penelitian tidak selalu menunjukkan dampak yang seragam. (Hajatina & Hasanah, 2024) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap konsumsi agregat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut mereka, respons masyarakat terhadap perubahan tarif PPN sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, tingkat pendapatan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan PPN sangat kontekstual dan bergantung pada kondisi ekonomi yang melingkupinya.

Dalam ranah ekonomi digital, (Noviany et al., 2025) menyoroti bahwa implementasi PPN pada transaksi yang dilakukan secara elektronik cenderung dialihkan kepada konsumen dalam bentuk peningkatan harga. Akan tetapi, permintaan untuk layanan digital tergolong cukup inelastis, sehingga kenaikan harga tidak berdampak besar terhadap jumlah pengguna. Ini menunjukkan bahwa di beberapa sektor tertentu, peningkatan tarif PPN masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh pasar dan tetap mendukung pertumbuhan pendapatan negara.

Sementara itu, (Lungun, 2025) menekankan bahwa peningkatan penerimaan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh besar tarif, tetapi juga oleh perancangan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP). Modifikasi ambang batas dipandang sebagai opsi untuk memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif secara berlebihan, sehingga risiko penurunan konsumsi dapat diperkecil.

Dalam konteks global, (Brockmeyer et al., 2024) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PPN dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan negara, terutama di negara negara yang sedang berkembang. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kemampuan administrasi perpajakan serta tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Di negara yang memiliki sistem administrasi yang lemah, PPN justru berisiko menciptakan distorsi ekonomi dan meningkatkan beban kepatuhan, khususnya bagi usaha kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN harus disertai dengan pemberian kelembagaan agar manfaat fiskal dapat direalisasikan secara maksimal.

Selanjutnya, (Mascagni et al., 2023) menekankan bahwa dalam praktik, PPN kerap menghadapi tantangan terkait ketidakadilan distribusi serta kompleksitas regulasi. Meskipun PPN seharusnya berdifikat netral menurut teori, implementasinya

menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah cenderung menanggung beban pajak yang lebih berat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kerumitan administrasi menciptakan peluang untuk penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas kebijakan PPN.

Dari aspek distribusi beban pajak, (Brusco & Velayudhan, 2025) menegaskan bahwa dalam praktik PPN, tanggung jawab pajak tidak selalu sepenuhnya diambil oleh konsumen di akhir. Beban ini dapat diteruskan kepada produsen atau pekerja, tergantung pada kondisi pasar dan elastisitas permintaan. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN tidak sepenuhnya netral dan perlu memperhatikan dampak terhadap distribusi kesejahteraan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan di Indonesia, (Jennie Marcella Chandra et al., 2023) mencatat bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh mekanisme sistem evaluasi mandiri, pemeriksaan pajak, dan proses penagihan pajak. Namun, hanya proses penagihan pajak yang terbukti memiliki pengaruh signifikan secara terpisah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPN sangat bergantung pada penegakan pajak, sedangkan kesadaran sukarela wajib pajak masih belum menjadi faktor utama.

Selain itu, (Khilda et al., 2025) mengeksplorasi PPN dari sudut pandang pembangunan berbasis syariah. Studi ini mendapati bahwa PPN mampu mendukung pembangunan suatu negara jika dikelola dengan cara yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan pandangan lateratif bahwa efektivitas PPN tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review* atau telaah pustaka sistematis untuk menganalisis implikasi kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian Indonesia. Kajian dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel kebijakan, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam kurun waktu terkini. Proses seleksi literatur didasarkan pada kriteria akreditasi dan reputasi jurnal, relevansi topik, serta tahun terbit (utamanya periode 2022-2025) untuk memastikan kesegaran dan keandalan sumber yang dikaji. Data dan temuan dari berbagai literatur tersebut kemudian disintesis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan konklusi yang berkaitan dengan dampak kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan negara, inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Analisis dilakukan dengan perspektif teoritis, seperti Teori Laffer Curve dan teori insiden pajak, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika kebijakan PPN dalam konteks perekonomian Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis berbagai kajian yang telah diajukan, tampak bahwa kebijakan PPN memiliki konsekuensi yang kompleks dan lebih bersifat kontekstual. Secara umum, sumber-sumber terpercaya menunjukkan adanya konsensus bahwa PPN merupakan alat fiscal yang ampuh dalam meningkatkan pemasukan negara, baik di tingkat lokal maupun global (Agustina & Hartono, 2022; Brockmeyer et al., 2024; Lamsah, 2025). Akan tetapi, efektivitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya terhadap aspek konsumsi, distribusi kesejahteraan, serta struktur ekonomi.

Beberapa kajian menemukan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi, terutama pada kelompok yang memiliki penghasilan rendah. Hasil ini diungkapkan melalui metode makroekonomi seperti model *Ekilibrium* umum yang dapat dihitung dan ditetapkan oleh (Agustina & Hartono, 2022), dan juga didukung oleh analisis (Lamsah, 2025) yang menekankan penurunan daya beli yang disebabkan oleh peningkatan harga barang dan jasa. Pola ini berhubungan erat dengan konsep teori *Laffer Curve*, yang menyatakan bahwa setelah titik tertentu, peningkatan tarif pajak dapat menimbulkan efek negatif aktivitas ekonomi.

Namun, tidak semua kajian menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap konsumsi total. (Hajatina & Hasanah, 2024) mengemukakan bahwa dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu jelas, karena sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro, tingkat pendapatan masyarakat, serta stabilitas harga barang pokok. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi tarif PPN pada titik optimal dalam kurva *Laffer Curve* tidak bersifat umum, melainkan tergantung pada konteks ekonomi dan periode analisis yang dipertimbangkan.

Tren terbaru dalam penelitian memperlihatkan pergeseran perhatian dari hanya menganalisis peningkatan tarif PPN ke aspek desain dan penerapan kebijakan. (Brockmeyer et al., 2024) menggarisbawahi bahwa efektivitas PPN sangat tergantung pada kemampuan administrasi pajak dan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Di negara dengan sistem administrasi yang lemah, penerapan PPN malah dapat menyebabkan distorsi dalam ekonomi dan meningkatkan beban kepatuhan, terutama untuk usaha kecil.

Penemuan ini didukung oleh (Mascagni et al., 2023), yang menekankan bahwa dalam praktiknya, PPN kerap menghadapi masalah ketidakadilan distribusi serta kerumitan regulasi. Meskipun secara teori PPN dirancang untuk bersifat netral, pelaksanaannya menunjukkan bahwa beban pajak lebih banyak dirasakan oleh kelompok dengan pendapatan rendah. Selain itu, penegakan hukum yang lemah memberi ruang untuk penghindaran pajak, sehingga keefektifan PPN tidak hanya tergantung pada tingkat tarif, melainkan juga pada kualitas lembaga yang mengawasinya.

Dalam konteks Indonesia, arah penelitian juga berfokus pada mekanisme pemungutan pajak. (Jennie Marcella Chandra et al., 2023) menemukan bahwa pertumbuhan penerimaan PPN masih sangat dipengaruhi oleh penagihan pajak,

dibandingkan dengan kesadaran wajib pajak secara sukarela. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan yang bersifat represif masih mendominasi, sedangkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam jangka panjang belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Selain aspek penerimaan dan administrasi, literatur juga menegaskan pentingnya pemahaman atas distribusi beban PPN. (Brusco & Velayudhan, 2025) menjelaskan bahwa dalam sistem PPN yang sebenarnya, beban pajak tidak selalu sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir. Beban tersebut dapat dialihkan kepada produsen atau pekerja, tergantung pada struktur pasar serta elastisitas permintaan. Hal ini membuktikan bahwa PPN tidak sepenuhnya netral dan dapat mempengaruhi distribusi kesejahteraan.

Penelitian mengenai sektor ekonomi digital memberikan sudut pandang tambahan tentang karakteristik PPN yang bervariasi antar sektor. (Noviany et al., 2025) menemukan bahwa penerapan PPN pada layanan digital cenderung diteruskan kepada konsumen melalui peningkatan harga, Meskipun permintaan tergolong relatif tidak elastis. Keadaan ini mengindikasikan bahwa di sektor tertentu, kenaikan tarif PPN masih dapat diterima oleh pasar dan tidak berarti mengurangi konsumsi secara signifikan.

Di samping itu, (Lungun, 2025) mengarahkan perhatian pada kebijakan ambang batas PKP. Penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan PPN dapat dioptimalkan melalui perluasan basis pajak tanpa perlu menaikkan tarif, sehingga potensi penurunan konsumsi dapat diminimalkan. Arah ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN yang efektif tidak selalu berkaitan dengan kenaikan tarif.

Secara konseptual, kajian yang ada menunjukkan bahwa PPN tidak bisa dilihat hanya sebagai alat untuk meningkatkan pemasukan negara. PPN juga merupakan kebijakan yang berpengaruh besar terhadap pola konsumsi, distribusi kesejahteraan, dan kestabilan ekonomi. Pemahaman ini diperluas oleh penelitian yang dilakukan oleh (Khilda et al., 2025), yang melihat PPN dalam konteks Pembangunan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa PPN bisa diterima dan memiliki dampak positif terhadap Pembangunan jika diatur dengan cara yang transparan, akuntabel, serta berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, analisis literatur mengindikasikan bahwa pengembangan kebijakan PPN di masa depan harus memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan negara, perlindungan daya beli masyarakat, dan peningkatan desai serta administrasi perpajakan. Pendekatan ini sejalan dengan ide dari teori *Laffer Curve* yang menekankan pentingnya menemukan titik kebijakan pajak yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPN berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara (Agustina & Hartono, 2022; Brockmeyer et al., 2024; Lamsah, 2025). Namun, efek tersebut tidak selalu bersifat linear dan seringkali disertai oleh dampak pada konsumsi rumah tangga, daya beli

masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Literatur juga mengindikasikan bahwa efek dari kenaikan PPN sangat bergantung pada keadaan ekonomi, struktur pasar, dan karakteristik dari sektor yang dikenakan pajak. Di sektor dengan permintaan yang relatif elastis, kenaikan PPN berpotensi untuk menekan tingkat konsumsi dan memperlambat kegiatan ekonomi (Agustina & Hartono, 2022; Lamsah, 2025). Disisi lain, pada sektor dengan permintaan inelastis, seperti sektor layanan digital, kenaikan PPN tidak secara signifikan mengurangi konsumsi, sehingga tetap efektif dalam meningkatkan pendapatan negara (Noviany et al., 2025). Selain itu, temuan penelitian menekankan bahwa efektivitas PPN tidak hanya tergantung pada tingkat tarif yang diterapkan, tetapi juga pada kualitas desain kebijakan dan kapasitas pengelolaan administrasi perpajakan. Kelemahan dalam sistem administrasi, kompleksitas aturan, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengurangi efektivitas PPN dan menyebabkan distorsi ekonomi (Brockmeyer et al., 2024; Mascagni et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan PPN perlu dilihat sebagai kebijakan yang bersifat multidimensi, bukan sekadar sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara. Secara teoritis, analisis literatur ini memperkuat pentingnya teori *Laffer Curve* dalam memahami hubungan antara tarif pajak dan pendapatan negara, terutama dalam konteks PPN. Bukti empiris mengindikasikan bahwa peningkatan tarif PPN bisa meningkatkan pendapatan negara hingga suatu titik tertentu, namun berisiko memicu efek negatif pada konsumsi dan aktivitas ekonomi jika melebihi batas yang dianggap optimal. Ini menegaskan bahwa hubungan antara tarif pajak dan pendapatan negara bersifat non-linear dan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi serta struktur pasar. Di samping itu, kajian literatur memperluas wawasan teoritis tentang PPN dengan mengatakan bahwa asumsi netralitas pajak tidak selalu terjadi dalam praktik. Pembagian beban PPN mungkin bervariasi, tergantung pada elastisitas permintaan, struktur pasar, dan cara penyesuaian harga (Brusco & Velayudhan, 2025). Penemuan ini menambah kontribusi konseptual dalam memperkaya diskusi mengenai teori perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan keterkaitan antara kebijakan pajak, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Dari sudut pandang praktis, analisis literatur menunjukkan hasil yang signifikan untuk pengemangan kebijakan PPN di Indonesia. Pemerintah harus dengan cermat menilai ukuran dan frekuensi kenaikan tarif PPN agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan pada daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan kenaikan tarif PPN sebaiknya dilengkapi dengan program perlindungan sosial serta langkah-langkah pengendalian inflasi untuk mengurangi dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, penguatan manajemen perpajakan dan penyederhanaan peraturan menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas PPN. Peningkatan kemampuan pengawasan, penegakan hukum yang kontinyu, serta dorongan untuk kepatuhan sukarela dari para wajib pajak harus dilakukan dengan seimbang agar pendapatan PPN tidak hanya bergantung pada metode penagihan yang bersifat represif (Jennie Marcella Chandra et al., 2023). Implikasi praktis lainnya adalah perlunya pendekatan sektoral dalam kebijakan PPN. Karakteristik yang

berbeda dari sektor ekonomi, seperti sektor digital dan usaha kecil, membutuhkan perlakuan kebijakan yang sesuai. Selain itu, sinkronisasi kebijakan PPN dengan nilai nilai sosial dan etika, sebagaimana diungkapkan dalam pendekatan pembangunan berbasis syariah, dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan penerimaan masyarakat terhadap PPN (Khilda et al., 2025). Berdasarkan keterbatasan dan penemuan dalam studi yang dianalisis, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengevaluasi dampak peningkatan PPN dengan lebih terfokus pada kelompok pendapatan tertentu dan segmen ekonomi tertentu, terutama untuk jangka waktu menengah dan panjang. Penelitian yang menerapkan pendekatan mikro, dengan memanfaatkan data dari rumah tangga atau perusahaan, dapat menyajikan gambaran yang lebih mendalam terkait distribusi beban PPN. Di samping itu, penelitian mendatang bisa menyelidiki efektivitas kebijakan PPN yang diintegrasikan dengan alat fiskal lain, seperti subsidi, bantuan sosial, atau insentif pajak, dalam mempertahankan keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Studi perbandingan antar negara dengan karakteristik ekonomi yang beragam juga sangat penting untuk memperluas pemahaman mengenai tarif PPN yang paling optimal dalam konteks teori *Laffer Curve*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Brockmeyer, A., Mascagni, G., Nair, V., Waseem, M., & Almunia, M. (2024). DOES THE VALUE-ADDED TAX ADD VALUE? LESSONS USING ADMINISTRATIVE DATA FROM A DIVERSE SET OF COUNTRIES. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 107–132. <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.107>
- Brusco, G., & Velayudhan, T. (2025). VAT INCIDENCE IN REAL VAT SYSTEMS. *Journal of Public Economics*, 249, 105447. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105447>
- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(2).
- Jennie Marcella Chandra, Desitama Anggraini, L., & Meiriasari, V. (2023). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(2), 34–47. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020>
- Khilda, C., Maulana, F., Affattah, A. M., Indriani, N., & Dzikrayah, F. (2025). EFEKTIVITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERBASIS SYARIAH. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 70–85. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10003>

- Lamsah. (2025). DAMPAK KENAIKAN PPN TERHADAP EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10, 119–125.
- Lungun, R. (2025). FINDING THE OPTIMUM VALUE-ADDED TAX THRESHOLD OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN INDONESIA. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 13(1), 11–19. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap>
- Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). THE VAT IN PRACTICE: EQUITY, ENFORCEMENT, AND COMPLEXITY. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 525–563. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09743-z>
- Noviany, H., Indriasari, I., & Nurlaela, L. (2025). BALANCING REVENUE AND RETENTION: THE IMPACT OF VAT BASED DIGITAL TAXATION ON PLATFORM STRATEGY AND CONSUMER BEHAVIOR IN INDONESIA. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 3(4), 248–259. <https://doi.org/10.61978/summa.v3i4.878>